

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Untuk membantu peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti membaca beberapa acuan untuk penelitian skripsi ini agar dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran dalam topik yang sedang diteliti dan juga menghindari kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dan peneliti mereview beberapa penelitian sebelumnya antara lain sebagai berikut:

Menurut penelitian Iqbal Raharja Bukhori (2012), yang dilakukan dengan metode random sampling, kinerja perusahaan diukur menggunakan cash flow return on asset (CFROA), dengan sampel sebanyak 160 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel independen, yaitu Dewan Direksi, Dewan Komisaris, serta Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Yunizar, Rahardjo (2014) “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan”, hasil penelitian ini adalah Dewan Komisaris Independen dan Blockholder menunjukkan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA dengan arah positif. Perusahaan dengan proposi komisaris independen dan blockholder yang besar memiliki laba yang lebih tinggi berbeda dengan komite audit yang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba ROA.

Penelitian yang dilakukan Dwi Ermayanti (2011), tentang pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan dan kepemilikan manajerial negatif dan tidak signifikan.

Adapun penelitian lain yang dilakukan Dani Mulyadi (2014) yang menganalisis pengaruh good corporate governance dan leverage terhadap kinerja

keuangan perusahaan, dalam penelitian tersebut indikator yang digunakan adalah dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit yang menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris dan komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan berbeda dengan dewan direksi dan leverage yang tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Marn dan Romuald (2012), melakukan penelitian serupa dengan objek perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 20 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia, kinerja perusahaan diukur dari earning per share (EPS). Dari lima variabel independen, hanya Ukuran Dewan dan Struktur Kepemilikan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan.

Terdapat juga penelitian yang menggunakan pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan seperti penelitian milik Rany Dyah Retno M dan Danies Priantinah dalam jurnal ekonomi (Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta) Vol 1 No 1 tahun 2012 penelitian ini menyimpulkan Hasil Analisis, pertama GCG berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di BEI 2007-2010. Hal ini menunjukkan bahwa investor bersedia memberikan premium lebih kepada perusahaan yang memberikan transparansi atas pelaksanaan GCG dalam laporan tahunan mereka. Semakin tinggi tingkat implementasi GCG semakin tinggi nilai perusahaan. Kedua, pengungkapan CSR berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Nilai Perusahaan dengan variable control Ukuran Perusahaan, jenis industry, Profitabilitas, dan Leverage pada perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2007-2010. Hal ini di karenakan kualitas pengungkapan CSR daritahun 2007-2010 masih rendah dan belum mengikuti standar GR.

Hardikasari (2011), melakukan penelitian yang sama dengan objek penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sementara itu pada penelitian Caspar, Rose (2016), yang berjudul "Firm permormance and comply or explain

disclosure in corporate governance, menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara ROE/ROA terhadap Good Corporate Governance.

Adapun penelitian Babatunde dan olaniran (2009), *The Effect Of Internal and External Mechanism On Governance and Performance of Corporate Firms* in Nigeria dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian ini menyatakan ukuran dewan komisaris yang besar mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena semakin besar ukuran dewan komisaris semakin besar pengawasan yang dilakukan dan berimplikasi pada peningkatan kinerja perusahaan. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa dewan direksi independen tidak berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Penelitian ini juga memberikan hasil bahwa pengukuran kinerja keuangan berguna bagi analisis tata kelola perusahaan yang baik.

Tabel 2.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Kesimpulan
Agus Santoso (2017)	Pengaruh Good Corporate Governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variable intervening	Kepemilikan institusional, nilai perusahaan dan kinerja keuangan	Good Corporate Governance yang diwakili proxy kepemilikan institusional memiliki pengaruh tidak langsung yang signifikan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai variable intervening.
Candra Rifqi Triwinasis (2013)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional dan komisaris independent tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 2. Komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variable	Kesimpulan
Sawitri Sekaredi (2011)	Pengaruh Corporate Governance terhadap kinerja keuangan Perusahaan	Kinerja keuangan perusahaan, kepemilikan institusional, dewan komisaris, dewan direksi, dan komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 2. Dewan komisaris berpengaruh negative signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan 3. Dewan direksi berpengaruh positif tidak signifikan terhadap pasar sedangkan terhadap kinerja operasional berpengaruh negative signifikan 4. Komite audit berpengaruh negative tidaksignifikan terhadap pasar sedangkan berdasarkan operasional perusahaan berpengaruh negative signifikan.
Framudyo Jati (2009)	Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Kinerja Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kinerja perusahaan (ROA dan ROE), Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, dewan direksi dan komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. (menggunakan ukuran ROA) Kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan sedangkan kepemilikan institusional, dewan direksi dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan 2. (menggunakan ukuran ROE) Semua variabel independent tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perusahaan.
Ekowati Dyah Kestari (2011)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan	Kinerja keuangan, aktivitas dewan komisaris, dewan komisaris independent, dewan direksi, komite audit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aktivitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. 2. Dewan direksi dan dewan komisaris independent berpengaruh negative terhadap kinerja keuangan.

Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Variable	Kesimpulan
Maria Inez Sanchia dan Tuntun Salamantun Zen, SE., M.Si., Ak (2015)	Impact of Good Corporate Governance in Corporate Performance	Economic Value Added and Corporate Governance Perception Index	Berdasarkan analisis dan uji hipotesis, bisa jadi menyimpulkan bahwa tidak ada dampak yang signifikan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik terdiri dari Indeks Persepsi Tata Kelola Perusahaan (CGPI): Self-assessment, dokumen, kertas dan pengamatan terhadap kinerja perusahaan yang diukur oleh EVA.
Tamoi Janggu, Faizah Darus, Mustafa Mohamed Zain, Yussri Sawani (2014)	Does good corporate governance lead to better sustainability reporting? an analysis using structural equation modeling	Corporate Social Responsibility, Sustainability, Disclosure, board of directors, corporate governance.	Penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan, profesionalisme dan penunjukan dewan memiliki dampak yang signifikan terhadap pengungkapan keberlanjutan
Aon Waqas Awan (2016)	Impact of Corporate Governance on Financial Performance: Karachi Stock Exchange, Pakistan	Profit margin & return on equity sebagai dependen (profitabilitas) dan ukuran dewan, komite audit, rapat umum tahunan & kepala eksekutif (corporate governance)	Hasil penelitian membuktikan bahwa ukuran dewan dan komite audit memiliki hubungan positif dengan margin Laba dan Return on Equity, jika ada perubahan variabel independen itu juga stimulus dampak perubahan positif pada Return on Equity (ROE) dan Komite Audit (AC). Penelitian ini menawarkan panduan yang mendesak untuk kebijakan dan pengambil keputusan di semua jenis perusahaan untuk mengambil keputusan yang baik untuk mengatur sistem hirarki perusahaan mereka.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori agensi (agency theory) merupakan hubungan antara pemegang saham (*shareholders*) sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Karena mereka dipilih, maka pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Jika principal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh principal (Ichsan, 2015).

Teori agensi merupakan dasar yang digunakan memahami isu corporate governance dan earning management. Agensi teori mengakibatkan hubungan yang asimetri antara pemilik dan pengelola, untuk menghindari terjadi hubungan yang asimetri tersebut dibutuhkan suatu konsep yaitu konsep Good Corporate Governance yang bertujuan untuk menjadikan perusahaan menjadi lebih sehat. Penerapan corporate governance berdasarkan pada teori agensi, yaitu teori agensi dapat dijelaskan dengan hubungan antara manajemen dengan pemilik, manajemen sebagai agen secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi yang sesuai dengan kontrak (Sudrajat, 2013).

Salah satu asumsi utama dari teori keagenan bahwa tujuan principal dan tujuan agen yang berbeda dapat memunculkan konflik karena manajer perusahaan cenderung untuk mengejar tujuan pribadi, hal ini dapat mengakibatkan kecenderungan manajer untuk memfokuskan pada proyek dan investasi perusahaan yang menghasilkan laba yang tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi di proyek-proyek yang menguntungkan jangka Panjang (Hestanto, 2013). Teori agensi berfungsi untuk menganalisa dan menemukan solusi terhadap masalah-masalah yang ada dalam hubungan keagenan antara manajemen dan pemegang saham.

Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, antara lain (Hestanto, 2013):

1. Menyamakan kepentingan manajemen
2. Pengawasan Good Corporate Governance (GCG)
3. Pemberian reward dan punishment (penghargaan dan hukuman)
4. Utang sebagai sumber pendanaan perusahaan
5. Meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi

Teori agensi sangat sulit untuk diterapkan dan memiliki banyak kendala serta masih belum memadai, sehingga diperlukan suatu konsep yang lebih jelas mengenai perlindungan terhadap para stakeholders. Konsep tersebut harus berhubungan dengan masalah-masalah konflik kepentingan dan biaya-biaya agensi yang timbul, sehingga berkembang suatu konsep baru yang memperhatikan dan mengatur kepentingan-kepentingan para pihak terkait dengan kepemilikan dan pengoperasional (stakeholders) suatu perusahaan, yaitu konsep corporate governance (Windiarto, 2014).

Corporate Governance merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, sehingga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang diinvestasikan (Sochib, 2015).

2.2.2. *Good Corporate Governance*

2.2.2.1. Definisi *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance adalah seperangkat yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan (FCGI,2010:20)

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2004) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan untuk memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap mampu untuk meminimalisir terjadinya konflik keagenan, karena dalam GCG terdapat prinsip-prinsip yang dapat menjaga hubungan baik dan menjamin terpenuhinya hak pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan.

Mekanisme *Good Corporate Governance* (GCG) akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah (value added) untuk semua stakeholders. Pelaksanaan GCG harus didukung dengan organ perusahaan yang harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Organ perusahaan tersebut terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi dan Dewan Komisaris, serta organ perusahaan lain yang membantu terwujudnya *Good Corporate Governance* seperti sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan komite-komite lain yang membantu GCG.

2.2.2.2. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang dapat menciptakan suatu nilai tambah untuk semua para pihak yang berkepentingan (Daniri Achmad, 2011).

Jika *Good Corporate Governance* diterapkan dengan baik dalam suatu perusahaan, maka pengawasan terhadap perusahaan tersebut akan semakin baik sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan tersebut maka suatu perusahaan harus dapat menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, prinsip-prinsip GCG yang diterapkan dengan baik

dalam perusahaan dapat mendorong pemahaman antara para pihak yang berkepentingan mengenai hak dan kewajiban, serta berfokus pada pencapaian kinerja perusahaan yang diharapkan (Iqbal Raharja Bukhori 2012).

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 1 Agustus 2002 pasal 3 tentang penerapan praktik *Good Corporate Governance*, meliputi lima prinsip yaitu:

1. Transparency (Transparansi),

Merupakan keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. Independency (Kemandirian),

merupakan suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

3. Accountability (Akuntabilitas),

merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

4. Responsibility (Pertanggungjawaban),

Merupakan kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (Kewajaran),

merupakan keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.2.3. Unsur-unsur *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Sutedi (2011), unsur-unsur dalam GCG yaitu:

a. Corporate Governance – Internal

Perusahaan Unsur-unsur yang berasal dari dalam perusahaan adalah:

- 1) Pemegang saham;
- 2) Direksi;
- 3) Dewan komisaris;
- 4) Manajer;
- 5) Karyawan;
- 6) Sistem remunerasi berdasar kinerja;
- 7) Komite audit.

b. Corporate Governance – External Perusahaan

Unsur-unsur yang berasal dari luar perusahaan adalah:

- 1) Kecukupan undang-undang dan perangkat hukum;
- 2) Investor;
- 3) Institusi penyedia informasi;
- 4) Akuntan publik;
- 5) Intitusi yang memihak kepentingan publik bukan golongan;
- 6) Pemberi pinjaman;
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas.

Perilaku partisipasi pelaku *Corporate Governance* yang berada di dalam rangkaian unsur-unsur internal maupun eksternal menentukan kualitas *Corporate Governance*. Keberhasilan penerapan *good corporate governance* dipengaruhi oleh dua faktor yang memegang peranan, antara lain (Imam Ghozali, 2012):

A. Faktor Internal

Faktor internal dalam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan penerapan *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan, antara lain:

1. Terdapat budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta system kerja manajemen diperusahaan.
2. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
3. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
4. Terdapat system audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
5. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikuti setiap langkah perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu.

A. Faktor Eksternal

Faktor internal dalam *Good Corporate Governance* (GCG) adalah faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, diantaranya:

1. Terdapat system hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
2. Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik/Lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
3. Terdapat contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam acuan.
4. Terbangunnya system tata nilai social yang mendukung penerapan *good corporate governance* dimasyarakat. Ini penting karena melalui system ini diharapkan timbul partisipasi aktif sebagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.

5. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas Pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi *good corporate governance*.

2.2.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau Lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Lestari, 2017). Kepemilikan institusional merupakan salah satu factor yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap keberadaan manajemen (Novi Lidiawati, 2016)

Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan dapat terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial. Institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian akan semakin membatasi pihak manajemen dalam memainkan angka-angka dalam laporan keuangan (Kasmir, 2012).

Adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional menyebabkan penggunaan utang menjadi menurun. Hal ini karena peranan utang sebagai salah satu alat monitoring sudah diambil alih oleh kepemilikan institusional. Tindakan monitoring oleh pihak investor institusional dapat mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri yang dilakukan oleh manajer sehingga manajer dapat lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan (Lestari, 2017). Monitoring tersebut tentunya akan menjamin

kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Semakin besar kepemilikan oleh institusi keuangan maka semakin besar pula kekuatan suara dan dorongan untuk mengoptimalkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki kelebihan yaitu memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi serta memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi didalam perusahaan.

2.2.4. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan pihak dalam suatu entitas perusahaan sebagai pelaksana operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan dewan direksi, penentuan besar penghasilannya, serta pembagian tugas dan wewenang setiap anggota dewan direksi dilakukan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ukuran dewan direksi dihitung berdasarkan jumlah anggota dewan direksi pada suatu perusahaan. dewan direksi merupakan perwakilan para pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan Dewan Direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Irmala Sari (2010: 31),

Dewan Direksi bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, pemeliharaan suatu struktur organisasi, dan memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif. Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi secara tersurat diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan - kebijakan perusahaan,
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.2.5. Dewan Komisaris

Pada umumnya perusahaan-perusahaan di Indonesia berbasis System dual board (two-tier) merupakan sistem yang digunakan perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam struktur organisasi internal perusahaannya, yang satu dikenal sebagai dewan komisaris, sedangkan satu yang lain dikenal sebagai dewan direksi (Sugeng Pramudji, 2011).

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 ayat (5) menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit 2 (dua) anggota Dewan Komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota Dewan Komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Dewan komisaris bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan corporate governance sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 Pasal 108 yang menjelaskan bahwa dewan komisaris bertugas mengawasi kebijakan direksi dalam menjalankan perusahaannya serta memberi nasihat kepada direksi. Oleh karena itu, dewan komisaris berpengaruh besar dalam penyelenggaraan corporate governance oleh perusahaan

2.2.6. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris, yang bertugas untuk membantu melakukan pemeriksaan dan penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Sesuai dengan ketentuan yang ada di Indonesia, komisaris merupakan ketua komite audit. Independensi merupakan landasan dari efektivitas Komite Audit

(Novi Lidiawati, 2016). Independensi Komite Audit menjadikan Komite Audit memiliki kemandirian dalam menyampaikan sikap dan pendapat (Murtanto, 2017).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit mengatur mengenai independensi Komite Audit, seperti tercermin dalam peraturan berikut:

1. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau pihak lain yang memberikan jasa audit, jasa konsultasi lainnya kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
2. Bukan merupakan orang yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris.
3. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain.
4. Tidak mempunyai:
 - a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi atau Pemegang Saham utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
 - b. Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Semakin banyak jumlah komite audit independen dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan. Termasuk pengawasan pelaksanaan corporate governance dalam perusahaan. Maka, independensi komite audit masuk kedalam faktor penting yang mempengaruhi pelaksanaan corporate governance dalam suatu perusahaan.

2.2.7. Kinerja Keuangan Perusahaan

Kinerja keuangan adalah pencapaian prestasi perusahaan pada suatu periode yang menggambarkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Dwi Ermayanti 2011).

Untuk menilai kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari segi analisis laporan keuangan dan dari segi perubahan saham. Nilai perusahaan akan tercermin dari harga sahamnya. Sawitri (2011) berpendapat bahwa pengukuran kinerja hendaknya menggunakan atau mengintegrasikan dimensi pengukuran yang beragam. Sampai saat ini masih muncul perdebatan tentang pendekatan yang tepat bagi konseptualisasi pengukuran kinerja keuangan perusahaan.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2011) yang dikutip oleh Sari 2010, menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Data historis laporan keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Tujuan pelaporan adalah memberikan informasi yang berguna dalam keputusan-keputusan investasi dan kredit, menilai arus kas mendatang, dan informasi mengenai sumber daya dalam perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang utama adalah (1) Neraca, (2) Laporan Laba rugi, (3) Laporan ekuitas pemilik, dan (4) Laporan arus kas.

Perkembangan kinerja keuangan perusahaan manufaktur dapat diukur dengan menggunakan indikator laporan posisi keuangan (neraca). Laporan posisi keuangan menggambarkan jumlah investasi dalam sumber ekonomi perusahaan, kewajiban terhadap kreditur dan hak pemilik terhadap asset bersih perusahaan. Informasi dalam laporan posisi keuangan menjadi dasar untuk penentuan *rate of*

return, pengevaluasian struktur modal perusahaan dan penentuan likuiditas dan fleksibilitas keuangan perusahaan. Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham (Farida Titik, 2014).

Return On Equity (ROE) adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. ROE digunakan untuk mengukur kemampuan suatu badan usaha dalam menghasilkan laba dengan bermodalkan ekuitas yang diinvestasikan pemegang saham. Semakin tinggi rasio ROE, semakin tinggi pula nilai perusahaan (*shareholders value creation*), hal ini merupakan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di perusahaan tersebut (Teguh Setiawan, 2009). ROE dihitung dari laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas yang telah diinvestasikan pemegang saham perusahaan. Mauliridiyah Putri Sevilla (2014) menyatakan bahwa penggunaan ROE dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki keunggulan yaitu: memberikan gambaran profitabilitas perusahaan terhadap jumlah ekuitasnya dan adanya pengaruh positif ROE terhadap kinerja perusahaan.

2.2.7.1. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan

Ada empat tujuan dilaksanakannya pengukuran kinerja keuangan perusahaan (Munawir 2009:31) yakni untuk:

1. Mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, kewajiban keuangan yang dimaksud mencakup keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.

3. Mengetahui tingkat profitabilitas atau rentabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif.
4. Mengetahui tingkat stabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya sehingga tetap stabil. Kemampuan yang dimaksud diukur dari kemampuan perusahaan membayar pokok hutang dan beban bunga tepat pada waktunya.

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan di atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap review data, menghitung, mengukur, menginterpretasi, dan memberi solusi terhadap laporan keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu (Ridwan S Sundjaja, 2010).

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan

Perusahaan

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi masalah keagenan yang terjadi diantara pemegang saham dengan manajer. Keberadaan investor institusional dianggap mampu mengoptimalkan pengawasan kinerja manajemen dengan memonitoring setiap keputusan yang diambil oleh pihak manajemen selaku pengelola perusahaan. Dengan semakin tingginya kepemilikan institusional maka pihak institusi dapat memonitoring penuh setiap kinerja manajer, sehingga dapat mengurangi masalah keagenan yang biasa terjadi antara pemegang saham dengan manajer (Sawitri, 2011).

Permanasari (2010;6) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadikan mekanisme *monitoring* efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor terkehadapan dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap manipulasi laba. Pengawasan yang

dilakukan oleh pihak institusi tersebut akan membuat kinerja manajer dalam mengambil keputusan lebih baik dan tidak mementingkan diri sendiri sehingga akan berdampak positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.2. Pengaruh Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka Panjang. Pentingnya dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah dengan semakin banyak dewan berarti perusahaan dapat meminimiliasi permasalahan agensi antara pemegang saham dengan direksi? Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence* (Alexander dalam Lestari,2011). Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik. Pfeffer & Salancik (2010) dalam Hardikasari (2011) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi.

Semakin banyak jumlah dewan direksi dalam suatu perusahaan, maka akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang lebih baik (Oktapiyani, 2010). Dengan semakin banyaknya jumlah dewan direksi maka akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Penelitian yang dilakukan oleh Sekaredi (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.3. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada dewan direksi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas langsung terhadap perusahaan. Fungsi utama dari dewan komisaris adalah

mengawasi kelengkapan dan kualitas informasi laporan atas kinerja dewan direksi. Karena itu, posisi dewan komisaris sangat penting dalam menjembatani kepentingan principal dalam sebuah perusahaan. Dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (FCGI,2001).

Menurut Babatunde, dan olaniran (2009) jumlah ukuran dewan komisaris yang besar mampu meningkatkan kinerja perusahaan karena semakin besar ukuran dewan komisaris semakin besar pengawasan yang dilakukan dan berimplikasi pada peningkatan kinerja perusahaan.

Hardikasari (2011) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa banyak penelitian yang dilakukan menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan yang besar tidak bisa melakukan koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki dewan yang lebih kecil. Namun demikian, Dalton *et al.* (dalam Hardikasari, 2011) menyatakan adanya hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perusahaan.

2.3.4. Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan

Komite audit merupakan pihak independen yang bertanggung jawab langsung kepada dewan komisaris. Komite audit berperan untuk membantu dewan komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal. Komite audit juga memiliki peran untuk mengawasi pengendalian internal perusahaan dan juga pelaporan keuangannya (Trihartati, 2010).

Waterhouse dalam Lestari (2011) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Komite audit meningkatkan integritas dan kredibilitas pelaporan keuangan melalui: (1) pengawasan atas proses pelaporan termasuk sistem pengendalian internal dan penggunaan prinsip akuntansi berterima umum, dan (2) mengawasi proses audit secara keseluruhan. Hasilnya mengindikasikan bahwa

adanya komite audit memiliki konsekuensi pada laporan keuangan yaitu: (1) berkurangnya pengukuran akuntansi yang tidak tepat, (2) berkurangnya pengungkapan akuntansi yang tidak tepat dan (3) berkurangnya tindakan kecurangan manajemen dan tindakan illegal. Dari penjelasan tersebut bahwa disimpulkan komite audit akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang salah satunya adalah kualitas laba.

Menurut Putri (2010) komite audit memiliki hubungan yang positif terhadap profitabilitas perusahaan. Jadi setiap adanya peningkatan jumlah anggota komite audit maka akan diikuti dengan peningkatan pada kinerja perusahaan.

2.4. Pengembangan Hipotesis

H₁ = Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

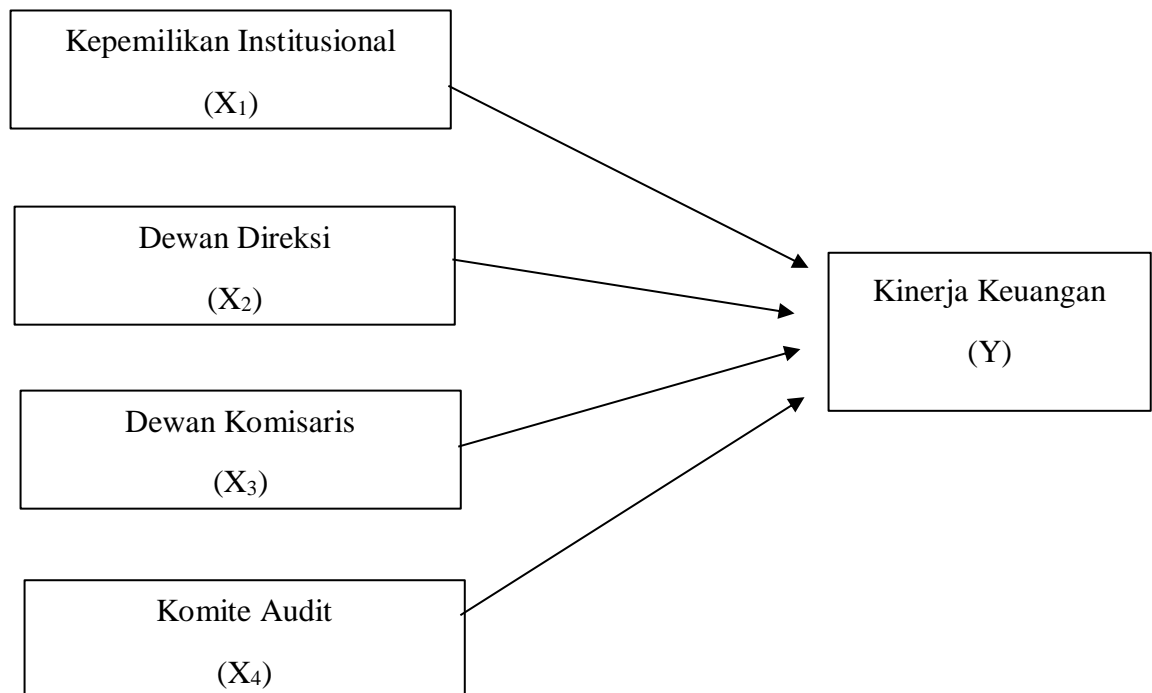
H₂ = Dewan Direksi berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

H₃ = Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

H₄ = Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Berdasarkan hasil kajian yang telah dikemukakan diatas dapat diperoleh kerangka pemikiran teoritis untuk mendukung penelitian ini yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual